

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan suatu negara, diperlukan suatu lembaga yang bertugas menjamin keamanan serta mutu produk yang beredar agar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi nasional yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang mengatur tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut berupa aset, baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar, yang dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien menjadi aspek krusial bagi BPOM dalam mendukung kelancaran operasional serta optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya.

Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai seluruh barang yang diperoleh melalui pembelian atau pengadaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Setiap instansi pemerintah sebagai pihak yang menggunakan atau memiliki kewenangan atas suatu barang memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya. Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai guna memastikan pengelolaan aset yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup berbagai tahapan, antara lain

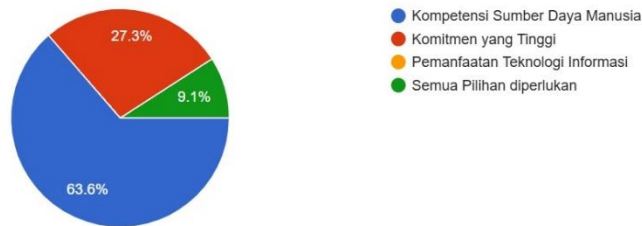
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pengguna barang maupun kuasa pengguna barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, termasuk laporan BMN pengguna atau kuasa pengguna, untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai pengelolaan aset dalam satu periode. Laporan tersebut menjadi sumber data yang penting dalam pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya.

Laporan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Informasi BMN ini disajikan dalam neraca LKPP, yang bersumber dari Laporan Barang Pengguna (LBP). LBP sendiri merupakan gabungan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP). Informasi dalam laporan-laporan barang tersebut mencakup pos-pos persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Dengan demikian, keakuratan data Barang Milik Negara (BMN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bertugas untuk memeriksa laporan keuangan guna memastikan bahwa penyusunan dan penyajiannya dilakukan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil pemeriksaan ini menghasilkan opini audit, yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini WTP dari BPK menjadi target utama dalam pengelolaan BMN, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, mencegah kecurangan (fraud), serta mempertahankan opini WTP sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik (BBPK, 2015). Dalam hal ini, opini BPK menjadi cerminan dari seberapa baik pengelolaan BMN dilaksanakan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berlandaskan prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan pengelolaan BMN yang optimal menjadi krusial dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara. (De Simone et al., 2019; Giglio et al., 2018; Montes et al., 2019).

Badan POM terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Setelah pertama kali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Catatan (WTP-DPP) pada tahun 2010, instansi ini sempat mengalami perubahan opini audit dari BPK hingga tahun 2013. Namun, sejak 2014

hingga 2022, Badan POM secara konsisten meraih opini WTP, yang mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2023 mengungkap bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan POM, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih belum optimal. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Padahal, akurasi informasi laporan keuangan sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban publik (DJKN, 2021). Nilai aset negara mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan nilai aset yang signifikan pada awal dekade 2010-an dipengaruhi oleh pelaksanaan program inventarisasi serta penilaian aset secara menyeluruh yang berlangsung dalam periode 2007 hingga 2012 oleh Kementerian Keuangan (DJKN, 2017). Namun, penerapan aturan penyusutan aset tetap pada tahun 2013 menyebabkan penurunan nilai aset yang tercatat. Kenaikan signifikan kembali terjadi pada tahun 2020 akibat program revaluasi aset tetap, terutama untuk tanah dan bangunan pada tahun 2018-2020 (DJKN, 2021). Selain revaluasi, pemerintah juga gencar melakukan sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang telah berstatus *free and clean*. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, melindungi aset negara, dan menindaklanjuti temuan BPK tahun 2019 terkait kekurangan dokumen kepemilikan aset (DJKN, 2023). Langkah ini selaras dengan tujuan Reforma Agraria yang menargetkan sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025 (DJKN, 2017).

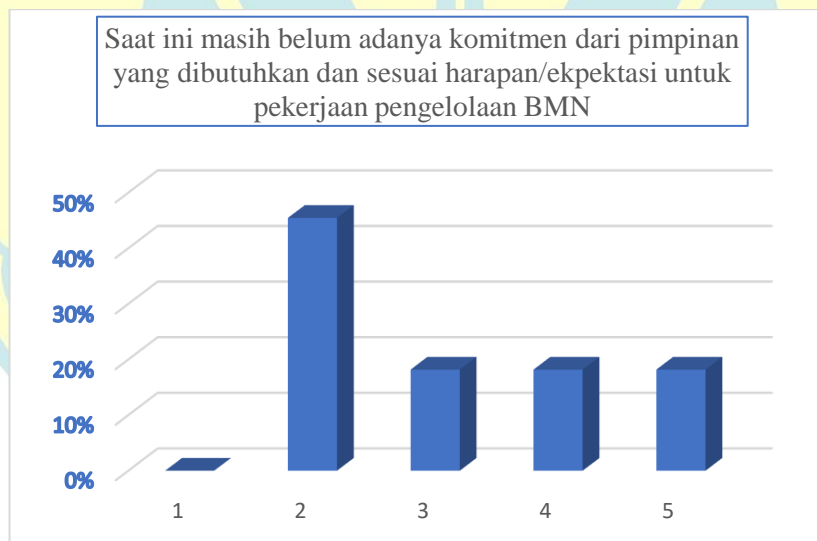
Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/KM.6/2022, pemerintah menetapkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebagai indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mencakup empat komponen utama yaitu akuntabilitas dan produktivitas, kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan efektif, serta administrasi yang handal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja seluruh instansi, termasuk Badan POM, dalam mengelola BMN secara efisien dan transparan. Pengelolaan BMN yang efektif juga merupakan bagian penting dari strategi Badan POM dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan POM 2020-2024, karena BMN mendukung operasional kantor.



Gambar 1.1 Variabel Yang Dibutuhkan Dalam Pekerjaan

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Pada saat melakukan survey di lapangan, hasilnya menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan komitmen pimpinan,,kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil survei, kompetensi SDM, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi masih belum optimal.



Gambar 1.2 Kondisi Saat Ini Terkait Komitmen Pimpinan

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Saat ini, komitmen pimpinan terhadap pengelolaan BMN belum merata di seluruh instansi. Beberapa pimpinan menunjukkan dukungan penuh dalam menjalankan tugas pengelolaan aset negara dengan baik, tetapi ada juga yang belum memberikan perhatian yang optimal. Padahal, komitmen pimpinan sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan BMN berlangsung secara efektif dan sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Keterlibatan aktif pimpinan berperan

penting dalam mendorong implementasi kebijakan, alokasi sumber daya, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan aset. Jika komitmen pimpinan tinggi dan merata, seluruh unit kerja akan lebih terdorong untuk bekerja sesuai dengan ketentuan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan BMN.



Gambar 1.3 Kondisi Saat Ini Terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Meskipun terdapat beberapa individu yang dinilai tinggi pada aspek-aspek tersebut, namun secara keseluruhan masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.



Gambar 1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi Saat ini

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di beberapa instansi pemerintah masih belum merata dan membutuhkan peningkatan signifikan. Meskipun beberapa lembaga telah mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk mempermudah pengelolaan aset negara, banyak lainnya yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi ini. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi ini dapat berdampak pada efisiensi dan akurasi dalam pencatatan, pelacakan, dan pengawasan aset negara. Tanpa dukungan teknologi yang optimal, proses pengelolaan BMN seringkali masih dilakukan secara manual atau dengan sistem yang terpisah-pisah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan data dan kesulitan dalam koordinasi antar bagian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara merata di seluruh instansi, termasuk pelatihan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan anggaran untuk implementasi sistem berbasis teknologi.

Jose A. Lukito, (2022) menyatakan bahwa sumber daya manusia, proses, serta teknologi merupakan elemen utama dalam pengelolaan BMN. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi untuk mengelola aset dengan efisien dan transparan serta dengan data yang akurat akan mendukung pengambilan keputusan. Sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi menjadi elemen penting dalam perumusan strategi pengelolaan aset negara, karena kompetensi pegawai dalam mengelola BMN sangat menentukan keberhasilan pengelolaan aset, kemampuan dalam menggunakan teknologi maupun regulasi yang berlaku. Pimpinan sebagai penggerak dalam organisasi. Komitmennya penting dalam menetapkan visi dan misi strategis untuk pengelolaan BMN, memastikan bahwa seluruh organisasi memiliki arah dan tujuan yang jelas serta mendorong kepatuhan akan regulasi dan akuntabilitas untuk menjamin transparansi dalam mengelola aset negara. Faisal et al., (2023) menyebutkan bahwa implementasi standar akuntansi berbasis akrual dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, teknologi informasi, serta tingkat komitmen organisasi.. Hasil penelitian Yusnidar et al, (2020) mengungkap bahwa berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan aset mencakup kualitas sumber daya aparatur, kebijakan dan regulasi, serta tingkat komitmen organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah ketidaktertiban dalam pelaporan BMN dapat terkait dengan kekurangan kompetensi dan komitmen pimpinan dalam pengelolaan aset. Komitmen pimpinan berkaitan dengan komitmen organisasi, terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan (Bhatti et al., 2019;

Holbert et al., 2021a; Sungu et al., 2019; Yang et al., 2019). Beberapa penelitian dari Puspitarini et al., (2017b), Siregar et al., 2023; Paranga, (2020) ; Tampubolon et al., (2021) mendukung peran penting komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Namun Sari et al., (2018) menemukan hasil yang berbeda.

Kendala dalam pengelolaan barang milik negara mencerminkan kurangnya akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mukhtar et al. (2020) menyampaikan pemahaman tentang teknologi informasi dalam memproses data untuk menghasilkan informasi berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pengambilan keputusan (Al-Kasasbeh et al., 2021; Hochstetter et al., 2023; Tingey-Holyoak et al., 2021). Garmendia dan Kapur (2013) menyatakan bahwa kurangnya infrastruktur informasi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset. Puspitarini et al., (2017), Peny (2022) dan Anisykurlillah (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Namun Abdalla et al., (2022); Marpaung et al., (2021); Ricardo et al., (2022); Zulpahmi et al., (2023a) menyatakan hasil yang berbeda. Dengan beragamnya hasil penelitian, dalam upaya mengatasi kendala pengelolaan BMN tersebut, ada kemungkinan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif. Namun, diperlukan kompetensi yang memadai dari sumber daya manusia. Ditambah dengan adanya penerapan standar akuntansi berbasis akrual sejak 2015 yang menuntut kompetensi dalam pekerjaan pengelolaan barang milik negara. Kemampuan sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan kinerjanya (Stahl et al., 2020; Fanelli et al., 2020a; Manzoor et al., 2019). Penelitian tentang dampak kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan aset negara menunjukkan hasil yang beragam. Mochaimin et al. (2023), Firmansyah et al. (2020) dan Ekayanti et al. (2018) menyampaikan kompetensi SDM yang baik mendukung implementasi akuntansi akrual dan pengelolaan aset yang efektif. Sementara Peny,(2022) menyampaikan pengaruh yang lebih terbatas. Namun Zulpahmi et al (2023), Firmansyah dan Hollyson, (2021), Kustianingsih dan Setiadi (2022), Yunita et al.,(2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji kompetensi SDM, komitmen kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset negara menunjukkan temuan yang bervariasi. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang spesifik mengeksplorasi bagaimana bagaimana ketiga faktor ini berinteraksi dalam konteks organisasi Badan POM. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan topik peran komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai mediasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh teknologi informasi, kompetensi pegawai, dan komitmen pimpinan dalam organisasi terhadap pengelolaan BMN di Badan POM. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor tersebut dan membantu merancang strategi serta kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan pengelolaan BMN dan kualitas layanan publik, khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dengan judul "Peran Komitmen Pimpinan dan Kompetensi SDM di Mediasi Teknologi Informasi Dalam Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)" pada "Badan Pengawas Obat dan Makanan" adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh dua variabel utama—kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan komitmen pimpinan—serta satu variabel mediasi-teknologi informasi, dalam pengelolaan BMN dalam ruang lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tiga faktor tersebut mempengaruhi pengelolaan BMN dan bagaimana hal ini dapat ditingkatkan untuk mendukung tugas dan peran strategis BPOM dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji “Peran Komitmen Pimpinan dan Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Mediasi Terhadap Pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan” maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
4. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi?
5. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi?
7. Apakah pengaruh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan barang milik negara dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi ?
8. Apakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi?

1.4 Tujuan Penulisan

Dengan mempertimbangkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah komitmen pimpinan memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan BMN?
2. Untuk menguji secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan BMN?
3. Untuk menguji secara empiris apakah teknologi informasi berpengaruh langsung dalam pengelolaan BMN?
4. Untuk menguji secara empiris apakah komitmen pimpinan berpengaruh langsung dalam pemanfaatan teknologi informasi?
5. Untuk menguji secara empiris apakah komitmen pimpinan berpengaruh langsung dalam kompetensi sumber daya manusia?
6. Untuk menguji secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia secara langsung mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi?

7. Untuk menguji secara empiris apakah komitmen pimpinan dimediasi oleh Teknologi Informasi berpengaruh dalam pengelolaan BMN?
8. Untuk menguji secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia dimediasi oleh Teknologi Informasi berpengaruh dalam pengelolaan BMN?

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat diantaranya:

1.5.1 Secara Akademis

Penelitian ini dapat menambah literatur yang ada mengenai pengelolaan BMN, khususnya dalam konteks Badan POM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang berharga bagi para akademisi dan peneliti lain yang tertarik dengan topik yang berkaitan dengan manajemen aset negara. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori-teori yang relevan dengan manajemen aset, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini berpotensi untuk memperluas pemahaman akademis mengenai hubungan yang kompleks antara variabel-variabel tersebut.

1.5.2 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur yang relevan mengenai pengaruh komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan barang milik negara. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki teori mengenai pengelolaan aset publik, dengan fokus pada peran teknologi informasi, kompetensi SDM, dan komitmen pimpinan, serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya

1.5.2 Manfaat Praktis

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan BMN, termasuk di antaranya adalah komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Meski sudah ada penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor tersebut, namun belum ada penelitian yang meneliti dampak dari seluruh faktor tersebut terhadap BMN di Lingkungan Badan POM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pemahaman teoretis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik negara di institusi pemerintah, serta rekomendasi praktis bagi Badan POM dalam meningkatkan pengelolaan barang milik negara melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kompetensi pegawai, dan penguatan komitmen pimpinan.

